

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Duwi Ida Restari

1711021012



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING AND UNEMPLOYMENT ON ECONOMIC GROWTH IN DISTRICTS/CITIES IN LAMPUNG PROVINCE

By
DUWI IDA RESTARI

This study aims to analyze the effect of government spending consisting of personnel spending, infrastructure spending, education spending, health spending and the open unemployment rate on economic growth in districts/cities throughout Lampung Province. This study uses panel data analysis method with Fixed Effect Model (FEM). Using the percentage of GDP as the dependent variable and personnel spending, infrastructure spending, education spending, health spending and the open unemployment rate as independent variables. The results showed that there was a positive and significant relationship between personnel spending, infrastructure spending, and health spending on economic growth. There is a positive but not significant relationship between education spending on economic growth and there is a negative and significant relationship between the open unemployment rate and economic growth.

Keywords : Economic Growth, Personnel Expenditure, Infrastructure Expenditure, Education Expenditure, Health Expenditure and Open Unemployment Rate

ABSTRAK

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

Oleh

DUWI IDA RESTARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan *Fixed Effect Model (FEM)*. Menggunakan presentase PDRB sebagai variabel terikat dan belanja pegawai, belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara belanja pegawai, belanja infrastruktur, dan belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan positif namun tidak signifikan antara belanja pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pegawai, Belanja Infrastruktur, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

DUWI IDA RESTARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

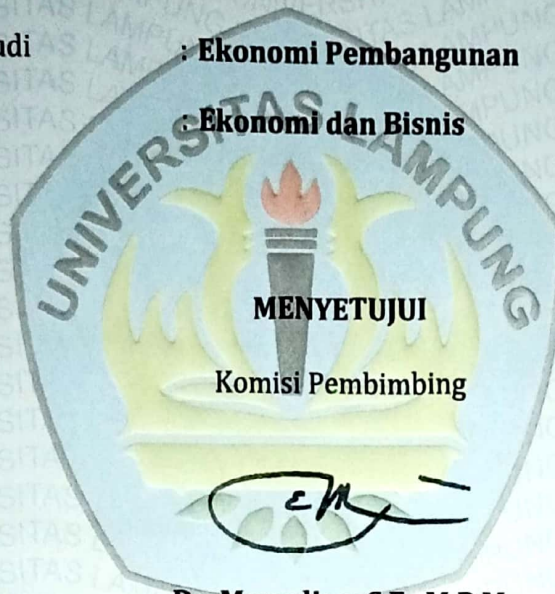
Judul Skripsi : **PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN
PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Duwi Ida Restari**

Nomor Induk Mahasiswa : **1711021012**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Marselina, S.E., M.P.M.
NIP 19670710 199003 2 001

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

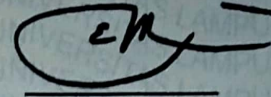
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Neli Aida', written in a cursive style.

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP 19631215 198903 2 002

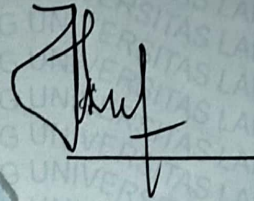
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

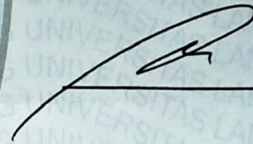
Ketua : Dr. Marselina, S.E., M.P.M.



Penguji I : Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc.



Penguji II : Asih Murwiati, S.E., M.E.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Oktober 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima konsekuensi/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Bandar Lampung, 21 Oktober 2022

Penulis



Duwi Ida Restari

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Bengkulu pada tanggal 20 juni 1998, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Dasiko dan Ibu Wijiyati.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-kanak (TK) Harapan Kita Prumdam, Bengkulu diselesaikan tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Podomoro diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pringsewu diselesaikan tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pringsewu diselesaikan tahun 2017. Adapun ekstrakurikuler yang diikuti yaitu Pramuka.

Tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBNPTN). Kegiatan organisasi yang pernah diikuti yaitu sebagai Staff Syiar Islam dan Keumatan dan Sekretaris Syiar Islam dan Keumatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, KSEI FoSEIL Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan KKL (Kuliah Kunjung Lapangan) di Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Museum Bank Indonesia, dan Studio Mata Najwa. Pada tahun 2020 penulis melakukan KKN (Kuliah KerjaNyata) di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari, dan melaksanakan magang di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung selama 30 hari.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil'Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tua penulis yang terhormat, terima kasih untuk Ayahku Dasiko dan Mamakku Wijiyati. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tak terhingga, atas pengorbanan, dan perjuangannya yang luar biasa sebagai panutan dalam hidup,serta atas doa yang selalu dilantunkan disetiap langkah ikhtiarku.

Keluarga besar, sahabat, dan teman – teman, terima kasih telah membantu dalam proses perkuliahan ku.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan motivasi, arahan, dan pelajaran yang luar biasa serta sangat membangun dalam proses perkuliahan dan penyelesaian karyatulis ini. Serta Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا الَّذِينَ فَخْتَنَّاكَ مِنْ يَوْمِ نُونًا

So patiently persevere: for verily the promise of Allah is true: nor let those shake thy firmness, who have (themselves) no certainty of faith.

(Ar Ruum | 30 : 60)

If you want something in your life you'er never had, you'll have to do something you're never done.

(JD Houston)

SANWACANA

Alhamdulillah Robbil'Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota SeProvinsi Lampung" merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan perhatian serta, memberikan arahan, ilmu, dan saran yang membangun

kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak Prof.Dr. Ambya, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan kepada penulis sejak semester awal hingga selesai.
6. Ibu Dr.Tiara Nirmala,S.E.,M.Sc selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Asih Murwiati,S.E.,M.E selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Arvina Ratih, S.E.,M.M. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran,arahan,dan tambahan ilmu dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan: Prof.S.S.P.Pandjaitan, Pak Nairobi, Pak Heru, Pak Yoke, Pak Muhidin, Prof. Toto, Pak Wayan, Pak Ambya, Pak Husaini, Pak Imam, Pak Yudha, Pak Moneyzar, Pak Thomas, Pak Arif, Pak Dedi, Ibu Betty, Ibu Irma, Ibu Emi, Ibu Marselina, Ibu Neli, Ibu Ida, Ibu Ratih, Ibu Asih, Ibu Zulfa, serta seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Ibu Yati, Ibu Mayra, Ibu Mimi, Mas Yogi dan seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan

yang selama ini diberikan kepada penulis.

11. Ayah dan mamakku tercinta, ayah Dasiko dan mamak Wijiyati yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis, terima kasih atas segala perjuangannya, kasih sayang yang luar biasa, serta nasihat yang selalu mengiringi segala ikhtiar penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah swt.
12. Mba Sri Minarti, mas Dwiyanto, kedua keponakanku Echa dan Nisa, pakwo Suwono, paman Suwito, paman Untung, bibi Semi, bibi Tentrem, pakde Wagiman, pakde Suroto, pakde Suroto serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
13. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN), Finta, Yoni, Rahmad, Ncik, Clara, dan Intan terima kasih sudah memberikan perhatian dan dukungan kepadapenulis.
14. Sahabat dan teman-teman tercinta Vellya, Qurrota, Siti, Fauzia, Lusi, Tiara, Maypani, Aulia, Much Irfan, Arief Krisna, Nabila, Eka, Ratih, Sari, Karina, Nirmala, Rahayu, Ages, Siti Istikomah, Indah Laras, dan Serli. Terima kasih sudah saling mengingatkan, membantu, dan berjuang bersama.
15. Teman seperjuangan Ekonomi Publik 2017 yang luar biasa, terima kasih telah berjuang bersama selama proses perkuliahan.
16. Keluarga Jurusan Ekonomi Pembangunan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kekompakkan dan kekeluargaannya.
17. Keluarga ROIS FEB, Doni, Vellya, Bambang, Siti, Indah, Abdih, Afif,

Ages, Eka, Eko, Fina, Ghaiby, Hafizd, Naqon, Qurrota, Rahayu, Ratih, Riski, Robby, Wulan, Chaniado, Arifin, dan Deni. Terima kasih sudah kebersamai dalam berorganisasi dan pengalaman luar biasa, serta saling menguatkan dalam berdakwah.

18. Teman–teman seperjuangan aktivis dakwah kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kekeluargaanya, dan perjuangannya selama ini dalam kebersamai selama proses perkuliahan dan dalam berdakwah.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan do‘a yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2022

Duwi Ida Restari

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	24
1.3 Tujuan Penelitian	25
1.4 Manfaat Penelitian.....	25
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	27
2.1.1 Peran Pemerintah.....	27
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	30
2.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	31
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah.....	32
2.1.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	38
2.1.4 Pengangguran	40
2.1.4.1 Teori Pengangguran.....	42
2.2 Tinjauan Empiris	43
2.3 Kerangka Pemikiran	48
2.4 Hipotesis	48
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	50
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	50

3.3	Operasional Variabel Penelitian.....	51
3.3.1	Variabel Dependen.....	52
3.3.2	Variabel Independen.....	53
3.4	Teknik Analisis Data.....	54
3.4.1	Model Dinamis.. ..	54
3.4.1.1	Pengertian Model Dinamis.....	54
3.4.1.2	Simulasi Dengan menggunakan <i>Time Lag</i>	57
3.4.2	Analisis Regresi Data Panel.....	57
3.5	Teknik Pengolahan Data.....	60
3.5.1	Pemilihan Model Regresi.....	60
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	62
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	65
3.5.4	Koefisien Determinasi (R^2).....	68

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	70
4.2	Hasil Pengujian.....	71
4.2.1	Hasil Simulasi <i>Time Lag</i> Terbaik.....	71
4.2.2	Hasil Regresi Model Data Panel.....	72
4.2.2.1	Uji Chow.....	73
4.2.2.2	Uji Hausman.....	73
4.2.3	Hasil Estimasi Model Data Panel.....	74
4.2.4	Pengujian Asumsi Klasik.....	75
4.2.4.1	Uji Normalitas.....	75
4.2.4.2	Uji Multikolinieritas.....	75
4.2.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	76
4.2.4.4	Uji Autokorelasi.....	77
4.2.5	Pengujian Hipotesis.....	78
4.2.5.1	Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t).....	78
4.2.5.2	Uji Signifikan Simultan (Uji F statistik).....	78
4.2.5	Koefisien Determinasi (R^2).....	79
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
4.3.1	Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Petumbuhan Ekonomi.....	80

4.3.2 Pengaruh Infrastruktur Terhadap Petumbuhan Ekonomi.....	82
4.3.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Petumbuhan Ekonomi.....	83
4.3.4 Pengaruh Kesehatan Terhadap Petumbuhan Ekonomi.....	85
4.3.5 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Petumbuhan Ekonomi.....	86
4.3.6 Interpretasi Intersep Setiap Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.....	88
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

HALAMAN

TABEL 1 Klasifikasi tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah...	7
TABEL 2 Alokasi Pagu Belanja Infrastruktur Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 (Miliar Rupiah)	12
TABEL 3 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2015-2019	14
TABEL 4 Realisasi Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Ribu Rupiah)	16
TABEL 5 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Tahun)	18
TABEL 6 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Persen) ..	22
TABEL 7 Penelitian Terdahulu	43
TABEL 8 Operasionalisasi Variabel Penelitian	51
TABEL 9 Analisis Stastistik Deskriptif	70
TABEL 10 Hasil Simulasi <i>Time Lag</i> Terbaik	72
TABEL 11 Hasil Uji Chow	73
TABEL 12 Hasil Uji Hausman.....	73
TABEL 13 Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel	74
TABEL 14 Uji Multikolinieritas	76
TABEL 15 Uji Heterokedastisitas	76
TABEL 16 Hasil Uji t	78
TABEL 17 Hasil Uji f.....	78
TABEL 18 Nilai <i>intersep</i> 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung	89
TABEL 19 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Dalam Persen)	114
TABEL 20 Pengeluaran Pemerintah Sektor Belanja Pegawai Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Dalam Persen)	115
TABEL 21 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Dalam Persen)	116

TABEL 22 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Dalam Persen)	116
TABEL 23 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Dalam Persen)	117
TABEL 24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Dalam Persen)	117
TABEL 25 Statistik Deskriptif	118
TABEL 26 Lag Length Creteria	118
TABEL 27 Uji Heteroskedastisitas	119
TABEL 28 Deteksi Multikolinieritas	119
TABEL 29 Hasil Estimasi Regresi CEM, FEM, dan REM Simulasi Lag 1	120
TABEL 30 Hasil Estimasi Regresi CEM, FEM, dan REM Simulasi Lag 2	123
TABEL 31 Uji Chow	125
TABEL 32 Uji Hausman	126
TABEL 33 Cross Section-Fixed Effect	127

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

GAMBAR 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Harga Konstan Menurut Lampangan Usaha Tahun 2019	2
GAMBAR 2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Dalam Rupiah)	4
GAMBAR 3 Persentase Rata Rata Kemandirian Di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019	7
GAMBAR 4 Rata Rata Belanja Pegawai Di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung tahun 2012-2019	9
GAMBAR 5 Persentase Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Di Kabupaten /Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2018-2019	19
GAMBAR 6 Kurva Teori Keynesian Dalam Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah.....	31
GAMBAR 7 Bagan Pengeluaran Pemerintah Menurut Jenis Dan Fungsi.....	34
GAMBAR 8 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	40
GAMBAR 9 Uji Normalitas.....	119

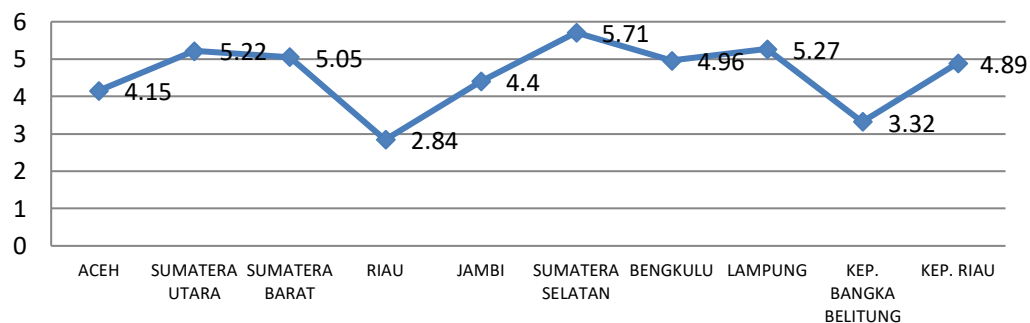
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Hasyim, 2016). Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau Provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai PDRB akan memberikan suatu gambaran bagaimana daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Menurut Simon Kuznet (1971) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya (Marselina, 2018).

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau Provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai PDRB akan memberikan suatu gambaran bagaimana daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah (Yunianto, 2021).

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik,2018). Agar dikatakan suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan PDRB harus diikuti pemerataan pendapatan, rendahnya pengangguran dan semakin baiknya fasilitas infrastruktur pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka masyarakat akan semakin banyak menikmati hasilnya. Memiliki sumber daya alam yang berpotensi di bidang pertanian, industri, pariwisata dan energi serta infrastruktur yang baik menjadikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tertinggi se Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Provinsi Se Sumatera Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019

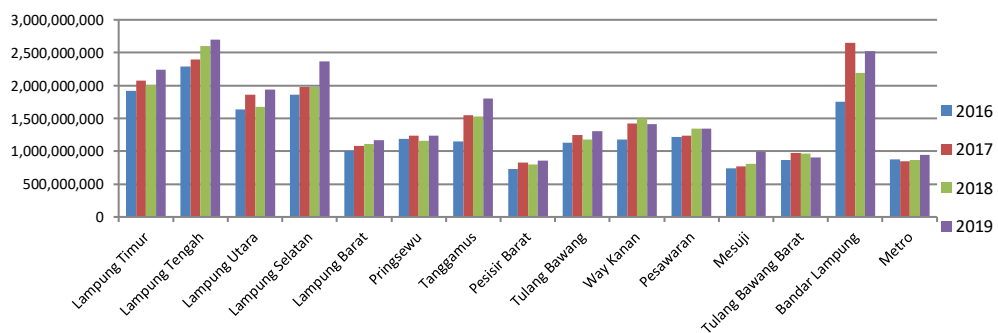
Sumber :BPS, diolah 2021

Pada Gambar 1 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dilihat dari PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha sebesar 5,27% pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung adalah yang tertinggi kedua se Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 5,71%. Pemerintah daerah Provinsi Lampung mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung akan terus meningkat, mengingat banyaknya potensi kekayaan alam dan

budaya, letak yang strategis dan kemudahan akses transportasi menjadi daerah wisata unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keberhasilan kebijakan yang dibuat pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Pemerintah berperan sebagai perumus dan pembuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah kebijakan dalam pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat sehingga menumbuhkan perekonomian daerah dan negara. Menurut Rostow dan Musgrave yang menyatakan bahwa jika pemerintah melakukan pengeluaran untuk mensejahterakan masyarakat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes menyatakan bahwa pemerintah harus intervensi dalam perekonomian melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter untuk mendorong kesempatan kerja penuh, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan meningkatkan belanja pemerintah (G) atau mengurangi pajak (tax) agar menambah belanja konsumsi sektor swasta. Bentuk persamaan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$. Dimana C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi swasta, G adalah pengeluaran pemerintah dan $X-M$ adalah net ekspor. Dari persamaan di atas menyatakan bahwa pemerintah melalui pengeluaran pemerintah (G) berperan penting dalam perekonomian.

Pengeluaran pemerintah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran untuk belanja dalam APBD, antara lain, belanja pegawai, belanja operasi (*operation expenditure*), belanja modal (*capital expenditure*), pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan social dan transfer ke daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal contohnya digunakan untuk pembangunan gedung seperti gedung sekolah dan gedung fasilitas kesehatan dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi.



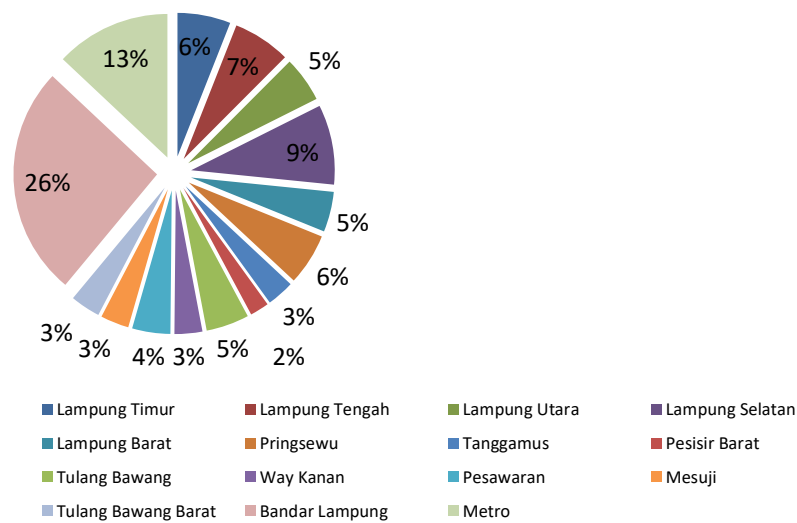
Gambar 2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 (Dalam Ribu Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung diolah tahun 2021

Pada Gambar 2 menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota se Provinsi Lampung mengalami naik turun atau fluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Namun di kabupaten Lampung Tengah, pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah yang terus meningkat menunjukkan bahwa semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pembagian belanja pegawai, belanja modal untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan memiliki presentasi pembagian yang telah diatur dalam undang-undang. Belanja pegawai memiliki proporsi yang cukup besar yaitu sebesar 30 persen dari APBD. Sementara salah satu sumber belanja modal adalah dari Dana Transfer Umum (DAU&DBH). Guna mempercepat pelayanan publik, mulai tahun 2017 pemerintah daerah harus mengalokasikan penggunaan 25 persen dari DTU untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, yang merupakan bagian dari belanja modal. Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dimana anggaran belanja pendidikan mendapat anggaran di atas 20 persen dari APBD. Berdasarkan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aparatur pemerintah daerah berperan penting dalam menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pelayanan publik yang kurang maksimal terjadi karena rendahnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta belum sesuai dengan standar prosedur pelayanan. Dengan rendahnya kualitas kinerja aparatur pemerintah akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dampaknya masyarakat enggan untuk membayarkan pajak akhirnya penerimaan pemerintah berkurang dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Halim (2012) menyatakan bahwa untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah melalui analisis rasio keuangan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.



Gambar 3. Presentase Rata Rata Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2012-2019

Sumber : Badan Pusat Statistika, diolah tahun 2021

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian
Sangat Rendah	0 – 25
Rendah	25 – 50
Sedang	50 – 75
Tinggi	75 -100

Sumber : Halim, 2012

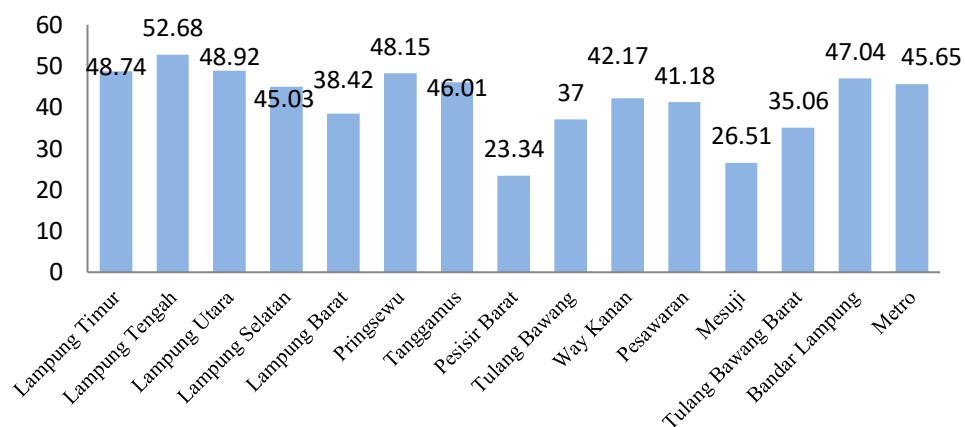
Dari Gambar 3 dan Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata rata tingkat kemandirian daerah di kabupaten/kota se Provinsi Lampung masih sangat rendah. Hanya terdapat satu kota yang memiliki kemandirian daerah di atas 25% (Gambar 3) yaitu kota Bandar Lampung dengan presentase sebesar 26,70%. Artinya masih tingginya tingkat ketergantungan kabupaten/kota se Provinsi Lampung terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Rendahnya kemendirian daerah salah satunya

disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja aparatur daerah dalam meningkatkan potensi penerimaan daerah.

Untuk memaksimalkan kinerja, pemerintah dapat memberikan *reward* dalam bentuk gaji dan tunjangan kepada aparatur yang memiliki kinerja terbaik, sehingga akan memberikan motivasi kepada aparatur lainnya untuk meningkatkan kinerja. Pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur daerah adalah melalui belanja pegawai. Karena belanja pegawai merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan wawasan aparatur daerah melalui seminar-seminar dan sosialisasi untuk menjangkau aspirasi masyarakat dan terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan juga memberikan pelayanan terbaik yang akan mengoptimalkan terlaksananya kebijakan APBD yang telah diprioritaskan.

Secara teoritis terdapat hubungan antara belanja pegawai dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pegawai terutama dalam gaji dan tunjangan misalnya, berdampak pada konsumsi masyarakat. Sedangkan konsumsi merupakan salah satu komponen pembentuk nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian (Fitri dkk., 2019). Hasil penelitian Fitri dkk., (2019) terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari dukungan belanja konsumsi masyarakat. Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan barat Indonesia. Terjadinya peningkatan belanja pegawai secara nyata dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengaruh

belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan belanja tersebut secara langsung dapat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Belanja pegawai dalam bentuk gaji, perjalanan dinas, honorarium dan belanja lainnya dapat mendorong pengeluaran konsumsi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Matthew and Udom (2015) yang juga menemukan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, kajian Bose et al., (2007) juga menyimpulkan adanya hubungan positif antara belanja publik dengan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pegawai mendorong konsumsi dan pada gilirannya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.



Gambar 4. Rata Rata Belanja Pegawai Di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019

Sumber : Badan Pusat Statistika, diolah tahun 2021

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa rata rata belanja pegawai tertinggi yaitu di kabupaten Lampung Tengah dengan presentase sebesar 52,68%. Diikuti kabupaten Lampung Utara dengan presentase sebesar 48,92%, kabupaten

Lampung Timur dengan presentase sebesar 48,74%, kabupaten Pringsewu dengan presentase sebesar 48,15%, kota Bandar Lampung dengan presentase sebesar 47,04%, kabupaten Tanggamus dengan presentase sebesar 46,01%, kota Metro dengan presentase sebesar 45,65%, kabupaten Lampung Selatan dengan presentase sebesar 45,03%, kabupaten Way Kanan dengan presentase sebesar 42,17%, kabupaten Pesawaran dengan presentase sebesar 41,18%, kabupaten Lampung Barat dengan presentase sebesar 38,42%, kabupaten Tulang Bawang dengan presentase sebesar 37%, kabupaten Tulang Bawang Barat dengan presentase sebesar 35,06%, kabupaten Mesuji dengan presentase sebesar 26,51%, dan kabupaten yang memiliki rata rata belanja pegawai terendah yaitu kabupaten Pesisir Barat dengan presentase sebesar 23,34%.

Ketika belanja pegawai di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 41,62% atau sebesar Rp.1.123.987.393.000 dari pada tahun 2018 41,47% atau sebesar Rp.1.078.642.626.000, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,45% di tahun 2019 menjadi 5,46%. Artinya ada hubungan positif antara belanja pegawai dengan pertumbuhan ekonomi, dimana ketika belanja pegawai ditingkatkan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Nurrahmah (2016) semakin tinggi belanja pegawai maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya kesejahteraan aparatur daerah melalui belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Rekanaharto (2014) yang menyatakan bahwa belanja pegawai memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan perbedaan hasil penelitian ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu adanya infrastruktur yang baik dan berkualitas. Infrastruktur yang baik akan menarik peran investor yang akhirnya akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kemakmuran masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Menurut David dkk., (2016) pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang penting bagi pemerintah daerah, namun kendala-kendala jangka panjang tetap menjadi tantangan yaitu salah satunya model perencanaan dan pembangunan jalan yang tidak efisien harus diperbaiki jika ingin menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Belanja infrastruktur daerah berkait langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Infrastruktur pusat berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, bendungan, irigasi, air dan listrik sementara di daerah berupa perumahan dan fasilitas umum yang dapat mendorong perekonomian daerah.

Tabel 2. Alokasi Pagu Belanja Infrastruktur di Provinsi Lampung tahun 2018-2019 (Miliar Rupiah)

Nama Kementrian	Belanja Modal	2018		2019	
		anggaran	realisasi	Anggaran	Realisasi
Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Belanja modal untuk infrastruktur	1.821,54	1.589,42	2.294,12	2.211,66
Kementrian perhubungan	Belanja modal untuk infrastruktur	188,14	185,14	55,16	54,23
Total		2.009,68	1.774,56	2.349,27	2.265,89

Sumber : Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Lampung

Pada Tabel 2 diketahui bahwa realisasi belanja modal untuk infrastruktur di kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2019 meningkat dari pada tahun 2018, yaitu sebesar 2.211,66 Miliar Rupiah atau sebesar 96,4% dari belanja modal untuk infrastruktur. Sedangkan realisasi belanja modal untuk infrastruktur di kementrian perhubungan tahun 2019 menurun dari pada tahun 2018, yaitu pada tahun 2018 sebesar 188,14 Miliar Rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 54,23 Miliar Rupiah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dapat mempercepat arus barang dan jasa. Hal ini selaras dengan penelitian Bastias (2010) menyatakan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Alamsyah dkk., (2019)

yang menunjukkan bahwa belanja infrastruktur memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Karena adanya perbedaan hasil penelitian terkait dengan belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah melalui pendidikan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, maka semakin mudah bagi masyarakat untuk menerapkan kemajuan teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan standar perekonomian. Meningkatnya tingkat pendidikan yang dicapai seseorang akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka daya beli masyarakat akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Penggagas teori ini antara lain Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, serta Edward Denison dan Theodore Schultz.

Untuk meningkatkan kualitas manusia pada sektor pendidikan, sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dimana anggaran belanja pendidikan mendapat anggaran di atas 20% dari APBD. Fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang berasal dari APBN dan APBD akan meningkatkan

tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Selain itu pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing untuk memperoleh kesempatan kerja dengan pendapatan yang lebih tinggi (Bhakti *et al.*,2014).

Tabel 3. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, 2015-2017

Wilayah	Angka Melek Huruf (Persen)			rata rata
	2015	2016	2017	
Lampung Barat	97,55	98,32	98,11	97,99
Tanggamus	96,86	95,9	96,67	96,47
Lampung Selatan	95,8	96,38	97,1	96,42
Lampung Timur	96,15	95,45	95,87	95,82
Lampung Tengah	95,94	96,38	96,68	96,33
Lampung Utara	96	97,15	97,57	96,90
Way Kanan	96,34	96,83	95,81	96,32
Tulang Bawang	97,34	97,29	96,82	97,15
Pesawaran	96,07	96,11	96,03	96,07
Pringsewu	96,53	97,24	97,1	96,95
Mesuji	95,95	95,26	95,13	95,44
Tulang Bawang Barat	96,41	94,54	95,11	95,35
Pesisir Barat	99,24	98,28	97,16	98,22
Bandar Lampung	98,69	99,23	98,79	98,90
Metro	98,31	98	97,69	98
rata rata	96,87	96,82	96,77	96,82

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung tahun 2015-2017

Di kabupaten/kota se Provinsi Lampung pada tahun 2015 sampai dengan 2017 memiliki rata-rata angka melek huruf sebesar 96,82%. Kabupaten yang memiliki rata-rata angka melek huruf di atas rata-rata adalah Bandar Lampung sebesar 98,90%, Metro sebesar 98%, kabupaten Pesisir Barat sebesar 98,22%, kabupaten Lampung Barat sebesar 97,99%, kabupaten Tulang Bawang sebesar 97,15%, kabupaten Pringsewu sebesar 96,95%, kabupaten Lampung Utara sebesar 96,90%, dan kabupaten yang memiliki presentase di bawah rata-rata angka melek huruf

adalah kabupaten Tanggamus sebesar 96,47%, kabupaten Lampung Selatan sebesar 96,42%, kabupaten Lampung Tengah sebesar 96,33%, kabupaten Way Kanan sebesar 96,32%, kabupaten Pesawaran sebesar 96,07%, kabupaten Lampung Timur sebesar 95,82%, kabupaten Mesuji sebesar 95,44%, dan kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 95,35%. Presentase angka melek huruf di kabupaten/kota se Provinsi Lampung sangat tinggi, tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Ini menandakan bahwa lebih dari 95% penduduk di kabupaten/kota se Provinsi Lampung dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Tabel 4. Realisasi Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Timur	463.336	523.275	692.129	699.143	699.714	741.264	748.447	781.359
Lampung Tengah	893.762	673.776	713.383	868.929	889.625	908.054	888.446	909.436
Lampung Utara	312.953	355.521	400.916	501.667	497.442	570.777	530.364	570.915
Lampung Selatan	537.815	360.471	391.254	514.219	571.124	620.854	619.280	673.960
Lampung Barat	193.357	221.536	220.065	258.144	234.631	267.217	296.857	305.239
Pringsewu	260.313	276.585	419.319	415.660	407.335	396.397	389.228	408.681
Tanggamus	370.084	268.844	297.212	399.700	434.186	537.792	509.654	536.185
Pesisir Barat	0,006	0,008	48.491	108.464	140.037	144.408	160.214	194.093
Tulang Bawang	228.745	141.979	158.323	224.443	221.678	258.640	266.287	266.287
Way Kanan	216.377	199.150	222.307	248.855	355.449	315.672	364.425	393.625
Pesawaran	199.607	244.148	276.313	322.159	371.994	391.671	392.450	419.745
Mesuji	86.418	94.408	102.393	135.942	149.502	142.607	156.643	209.149
Tulang Bawang Barat	94.878	105.633	107.808	186.294	222.830	236.723	220.667	256.549
Bandar Lampung	438.556	532.815	538.687	569.118	892.865	815.166	748.329	705.775
Metro	197.842	159.226	181.371	216.574	271.727	207.930	211.701	200.414
Jumlah	299.603	277.158	317.998	377.954	424.009	437.012	433.533	455.427

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012-2019

Dapat dilihat dari Tabel 4 bahwa belanja sektor pendidikan di kabupaten/kota se Provinsi Lampung tahun 2012 sampai dengan 2019 cenderung meningkat. Dengan rata-rata presentase lebih dari 20% sebanyak 13 kabupaten/kota se Provinsi Lampung dan hanya 2 kabupaten yang memiliki rata-rata presentase kurang dari 20% yaitu kabupaten Pesisir Barat dan kabupaten Mesuji. Total belanja pemerintah sektor pendidikan di kabupaten/kota se Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan tahun 2012 sampai dengan 2019. Total belanja pemerintah sektor pendidikan di kabupaten/kota se Provinsi Lampung secara berturut dari tahun 2012 sampai dengan 2019 sebesar Rp.299.603 Miliar, Rp.277.158 Miliar, Rp.317.998 Miliar, Rp.377.954 Miliar, Rp.424.009 Miliar, Rp.437.012 Miliar, dan Rp.433.533 Miliar.

Belanja pemerintah sektor pendidikan yang tinggi dan terus meningkat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kabupaten/kota se Provinsi Lampung, dengan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan masyarakat akan mampu bersaing secara nasional dan internasional dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang tinggi sehingga akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Anggraeni (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berhubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian Anggraeni, Hasil penelitian Paradiska (2020) menyatakan

bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bastias (2010) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil penelitian ini mendasari untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait pengaruh belanja pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Suatu daerah dapat dikatakan maju tidak hanya dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) saja tetapi juga dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH). Kesehatan juga menjadi unsur penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Masalah pokok yang belum terselesaikan di Provinsi Lampung adalah masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, belum teratasinya masalah gizi masyarakat, masih tinggi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) pada masyarakat. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar tetapi meliputi jiwa yang sehat di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan. Dengan jiwa dan fisik yang sehat masyarakat akan lebih produktif sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2019 (Tahun)

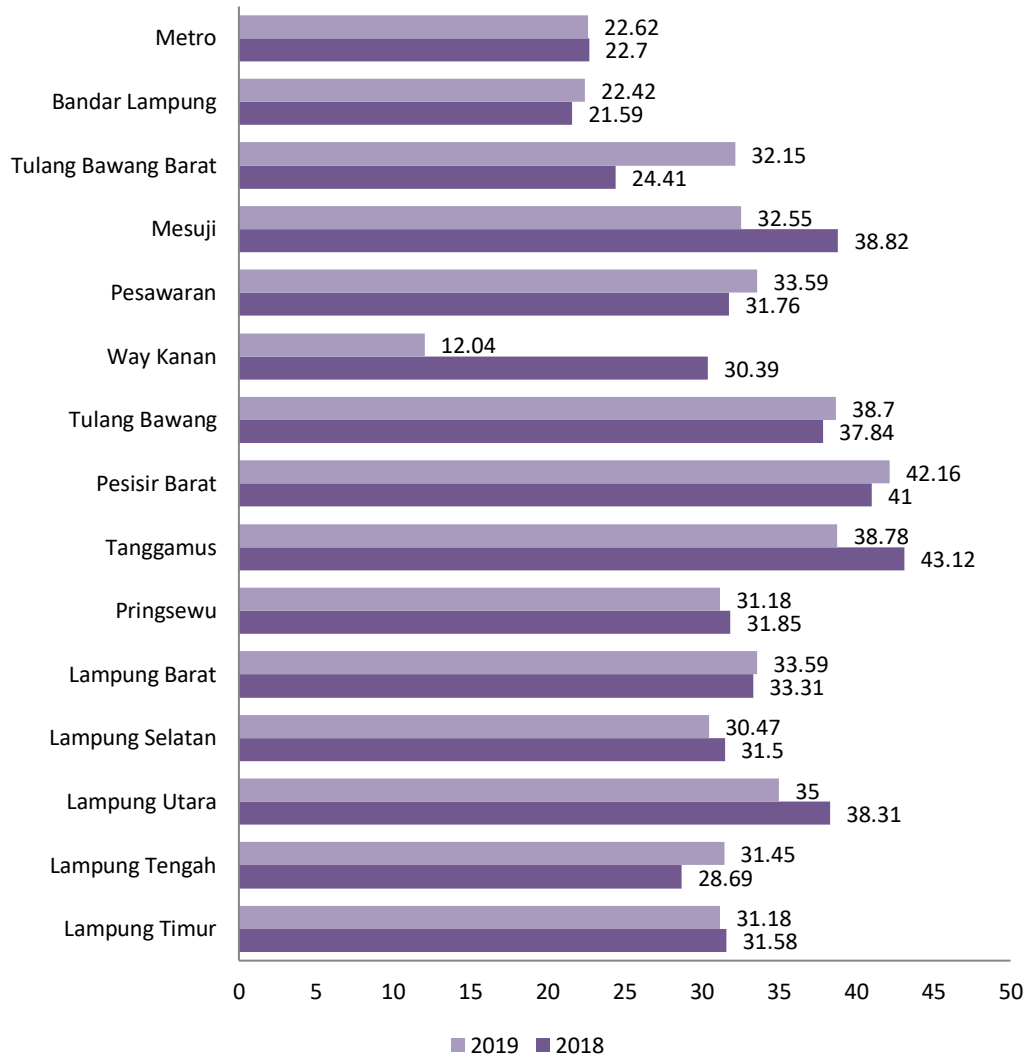
Wilayah	Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk (Tahun)								Rata Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Lampung Barat	65,6	65,7	66	66,4	66,6	66,9	67,1	67,4	66,46
Tanggamus	66,7	66,8	67,1	67,4	67,6	67,8	68	68,4	67,48
Lampung Selatan	67,7	67,8	68,1	68,3	68,5	68,7	68,9	69,2	68,39
Lampung Timur	68,9	69	69,3	69,7	69,9	70,1	70,3	70,6	69,74
Lampung Tengah	68,5	68,6	68,9	69	69,2	69,3	69,5	69,8	69,08
Lampung Utara	67,6	67,7	68	68,1	68,3	68,5	68,7	69,1	68,24
Way Kanan	67,8	67,9	68,2	68,4	68,6	68,7	69	69,3	68,48
Tulang Bawang	68,6	68,6	68,9	69,1	69,3	69,4	69,6	69,9	69,18
Pesawaran	66,9	67	67,3	67,8	68,1	68,3	68,5	68,9	67,85
Pringsewu	67,6	67,7	68	68,6	68,9	69,1	69,4	69,9	68,65
Mesuji	66,6	66,7	67,1	67,2	67,3	67,5	67,7	68	67,25
Tulang Bawang Barat	68,6	68,7	69	69,1	69,2	69,4	69,6	69,9	69,16
Pesisir Barat	61,2	61,4	61,7	62	62,3	62,5	62,9	63,3	62,16
Bandar Lampung	70,2	70,3	70,6	70,7	70,8	70,8	71	71,3	70,69
Metro	70,7	70,7	71	71	71,1	71,1	71,3	71,6	71,03
Rata Rata	67,4	67,5	67,5	67,6	68	68,2	68,4	68,5	68,8

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012-2019

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan 2019 di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Meskipun mengalami peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) setiap tahunnya rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) di kabupaten/kota se Provinsi Lampung hanya sebesar 68,8 tahun. Walaupun cukup tinggi, namun angka ini belum mencapai target yang diharapkan yaitu 72 tahun.

Pemerintah sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi membutuhkan upaya-upaya dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pengeluaran pemerintah. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).



Gambar 5. Presentase Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2018-2019

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018-2019, diolah

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan kabupaten/kota se Provinsi Lampung telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu lebih dari 10% dari dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

dan cenderung mengalami peningkatan dari pada tahun 2018. Kabupaten Tanggamus yang memiliki pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tertinggi mengalami peningkatan di tahun 2019 yaitu sebesar 43,12% dan pada tahun 2018 sebesar 38,78% dari total belanja pemerintah. Kabupaten Mesuji tahun 2018 sebesar 32,55% dan tahun 2019 naik menjadi sebesar 38,82%, kabupaten Lampung Utara tahun 2018 sebesar 35% dan tahun 2019 naik menjadi sebesar 38,31%, kabupaten Lampung Timur tahun 2018 sebesar 31,18% dan tahun 2019 naik menjadi sebesar 31,58%, kota Metro tahun 2018 sebesar 22,62% dan tahun 2019 naik menjadi sebesar 22,70%, kabupaten Pringsewu tahun 2018 sebesar 31,18% dan tahun 2019 naik menjadi sebesar 31,85%, kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 sebesar 31,45% dan tahun 2019 naik menjadi sebesar 28,69%, kabupaten Way Kanan tahun 2018 sebesar 12,04% dan tahun 2019 naik menjadi sebesar 30,39%, kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 sebesar 30,47% dan tahun 2019 naik menjadi sebesar 31,5%.

Dan kabupaten yang mengalami penurunan anggaran kesehatan adalah kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 sebesar 32,15% dan tahun 2019 turun menjadi sebesar 24,41%, kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 sebesar 42,16% dan tahun 2019 turun menjadi sebesar 41%, kabupaten Lampung Barat tahun 2018 sebesar 33,59% dan tahun 2019 turun menjadi sebesar 33,31%, kabupaten Pesawaran tahun 2018 sebesar 33,59% dan tahun 2019 turun menjadi sebesar 31,76%, kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 sebesar 38,7% dan tahun 2019 turun menjadi sebesar 37,84%, dan kota Bandar Lampung tahun 2018 sebesar 22,42% dan tahun 2019 turun menjadi sebesar 21,59%.

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan yang terus menurun akan berdampak pada Angka Harapan Hidup (AHH), karena biaya yang digunakan untuk fasilitas dan pelayanan kesehatan kurang maksimal. Kesehatan masyarakat yang menurun akan mempengaruhi produktifitas sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tjodi dkk., (2018) menyatakan bahwa pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil yang dilakukan Anggraeni (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap PDB. Dan penelitian Darmawan (2020) yang menyatakan bahwa variabel kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari perbedaan hasil penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah pengangguran masih menjadi pembicaraan. Pengangguran juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan suatu masalah. Dampak tingginya tingkat pengangguran akan banyaknya sumber daya menjadi sia-sia dan pendapatan masyarakat akan berkurang (Padang dan Murtala, 2019). Pengangguran terbuka adalah terciptanya pengangguran akibat dari lebih rendahnya penambahan lapangan kerja dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi dapat

menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat. Jika tingkat pengangguran rendah pertumbuhan ekonominya meningkat, begitu juga sebaliknya (Sanjaya dan Jember, 2019). Berdasarkan hukum okun (Okun's Law) yang dikenalkan oleh Artur Okun tahun 1962 menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan menurun dan sebaliknya, jika pengangguran meningkat maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012-2019 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka(dalam persen)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Timur	2,77	5,48	5,00	4,49	4,74	3,89	3,8	2,87
Lampung Tengah	2,64	3,33	2,48	2,94	2,71	3,08	2,51	2,61
Lampung Utara	8,1	7,4	5,57	7,62	6,55	5,62	4,83	5,11
Lampung Selatan	6,1	6,25	6,05	5,38	5,72	4,8	4,49	4,68
Lampung Barat	2,28	2,52	2,18	3,55	2,73	0,96	2,74	1,66
Pringsewu	5,98	3,76	3,78	3,85	3,81	4,63	4,13	4,92
Tanggamus	3,24	4,88	4,6	5,72	5,15	5,08	2,21	2,96
Pesisir Barat	0,01	0,007	0,012	0,009	0,008	2,71	1,87	3,25
Tulang Bawang	5,59	4,38	4,15	5,29	4,7	3,47	3,52	4,01
Way Kanan	3,36	4,19	3,35	3,53	3,44	2,88	4,42	3,59
Pesawaran	6,62	9,6	8,54	7,27	7,92	5,73	4,63	4,41
Mesuji	4,25	9,51	0,81	5,06	2,9	0,65	3,76	3,61
Tulang Bawang Barat	1,99	3,61	5,13	2,61	3,83	1,86	2,95	3,57
Bandar Lampung	12,32	10,67	8,29	8,51	8,4	8,1	7,27	7,15
Metro	11,48	4,36	4,23	5,12	4,68	4,64	5,79	5,12
Rata Rata	5,11	5,32	4,27	4,72	4,48	3,87	3,92	3,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2012-2019

Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung pada tahun 2012-2019 mengalami naik turun atau berfluktuatif. Kota Bandar Lampung yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi namun mengalami penurunan pengangguran dari tahun

2012-2019. Kabupaten Pesisir Barat sebagai kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terbuka terendah. Sementara kabupaten lain terus mengalami naik turun dalam tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan hukum okun yang menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini telah banyak penelitian yang dilakukan dengan hasil yang berbeda beda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septiatin dan Rizki (2016) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor menyebabkan angka pengangguran naik, diantaranya pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi industri padat modal yang banyak menggunakan teknologi. Itu tidak banyak menyerap tenaga kerja karena lebih mengandalkan tenaga mesin atau teknologi. Dan penelitian yang dilakukan Lal et al., (2010) yang meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di beberapa negara asia terpilih, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum okun tidak berlaku di semua negara dimana pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berhubungan positif artinya pertumbuhan ekonomi yang menurun maka akan diikuti penurunan pengangguran. Berbeda dengan hasil penelitian Astari dkk., (2019) menyatakan bahwa Hukum Okun terbukti berpengaruh negatif dan signifikan dalam perekonomian Indonesia karena variabel pertumbuhan ekonomi terbukti mempengaruhi variabel pengangguran secara statistik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka judul penelitian adalah tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Dari sektor pengeluaran

pemerintah yang digunakan adalah belanja pegawai, belanja infrastruktur, belanja pendidikan dan belanja kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dari penelitian yang dibahas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
6. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor belanja pegawai, sektor infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
4. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
5. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
6. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor belanja pegawai, sektor infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja/masukan untuk mengoptimalkan pengeluaran pemerintah dan penurunan tingkat pengangguran di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

2. Bagi mahasiswa untuk sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penelitian dalam melakukan analisis masalah yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran Pemerintah

Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a) Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
- b) Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
- c) Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian

- a) Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.
- b) Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Kegagalan pasar (*market failure*) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut

sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a) Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contoh barang dan jasa publik yaitu jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan penerangan. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan lebih murah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut.
- b) Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contoh : pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang akan terjadi disuatu daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses pengguna faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Mankiw, 2003).

Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika (1) masyarakat mendapatkan lebih banyak sumber daya, ataupun (2) masyarakat menemukan cara baru menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih efisien. Agar pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar kehidupan, tingkat pertumbuhan harus melebihi tingkat kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai peningkatan GDP riil per kapita. Case and Fair (2007: 313)

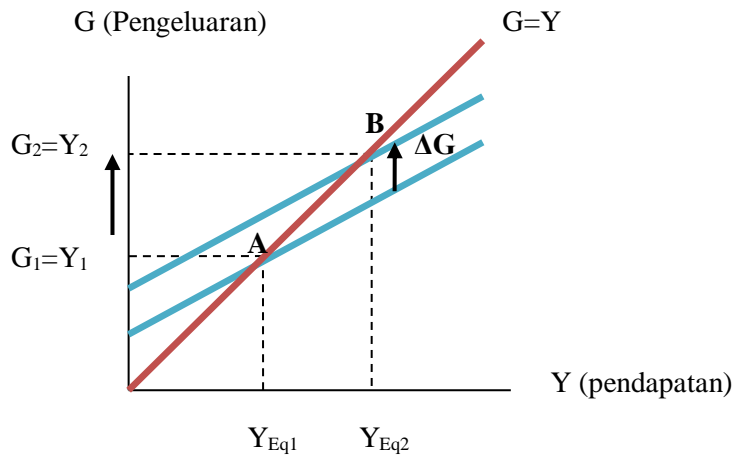
2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa teori yang mengembangkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu:

1) Teori Keynesian

Menurut Keynes dalam buku Sadono Sukirno (2000), kegiatan perekonomian terutama tergantung kepada segi permintaan, yaitu tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat yang wujud tidak selalu mencapai full employment, untuk mengatasinya pemerintah perlu mempengaruhi pengeluaran agregat. Komponen utama pembelanjaan agregat ada 4 yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Jika dikaitkan dalam penelitian ini, dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pengeluaran agregat, dimana salah satu komponen penting dalam agregat adalah pengeluaran pemerintah.

Teori Keynesian dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat melalui kurva di bawah ini :



Gambar 6. Kurva Teori Keynesian Dalam Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Berdasarkan Gambar 6 menjelaskan bahwa kenaikan dalam pengeluaran pemerintah (ΔG) meningkatkan pengeluaran sebesar jumlah tingkat pendapatan tertentu. Artinya pendapatan berbanding lurus dengan pengeluaran, jadi ketika pendapatan meningkat maka pengeluaran akan meningkat. Garis Y_{Eq} dan garis $G=Y$ menggambarkan bahwa semua pendapatan nasional dibelanjakan pemerintah untuk keperluan kegiatan –kegiatan pemerintah.

2.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Todaro (2002). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah adalah belanja yang dilakukan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yaitu pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Belanja pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Tujuan Belanja Daerah :

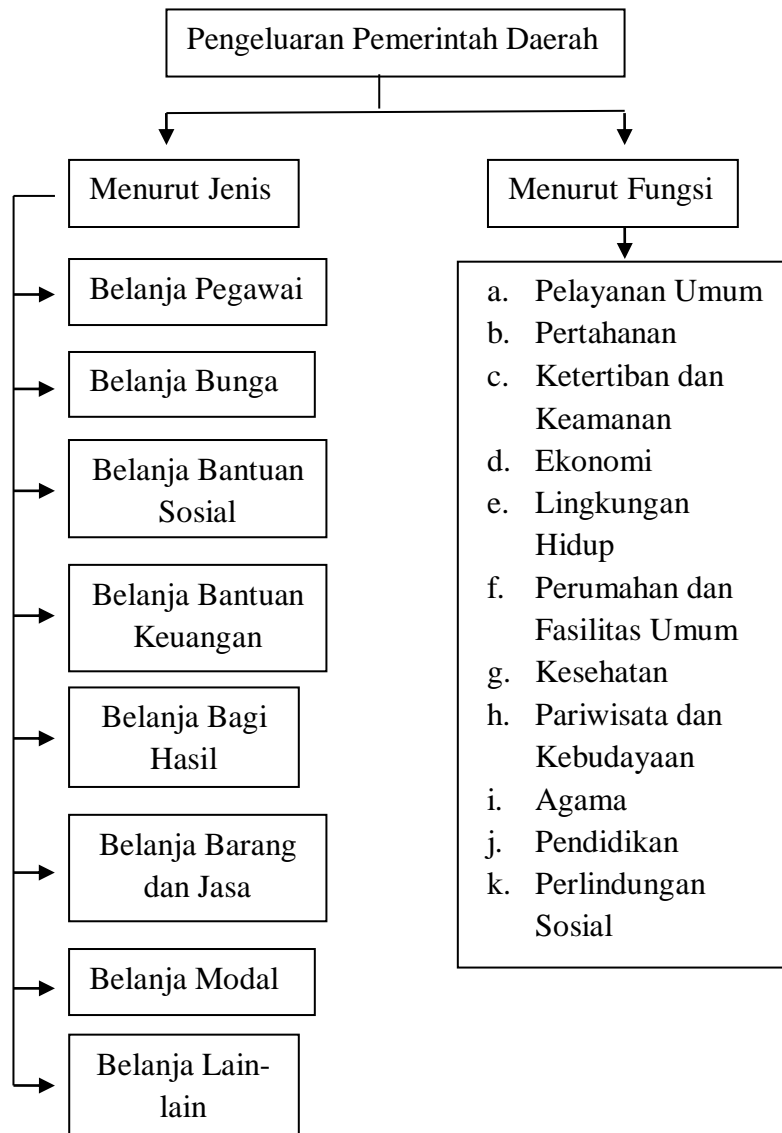
- a) Merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang tersedia pada suatu negara/daerah
- b) Sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik

- c) Sebagai alat untuk memperinci penggunaan sumber-sumber yang tersedia menurut objek pembelanjannya sehingga memudahkan pengawasan atas pengeluarannya
- d) Sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk pembatasan pengeluaran
- e) Sebagai alat untuk menampung, menganalisis serta mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang diusulkan
- f) Sebagai pedoman atau tolok ukur serta alat pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, program dan proyek yang dilakukan pemerintah.

Menurut Soediyono (1992), Pengeluaran Pemerintah berdasarkan pos pengeluaran pemerintah yang ada di APBN dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran rutin yaitu terkait biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- b) Belanja pembangunan yaitu terkait biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat proses pembangunan yang meliputi sarana dan prasarana ekonomi seperti pembangunan jalan raya, irigasi, listrik dan lain-lain, peningkatan sumberdaya manusia seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan perumahan; peningkatan kapasitas pemerintah seperti pengembangan aparatur pemerintah.

Pengeluaran Pemerintah Menurut Jenis dan Fungsi :



Gambar 7. Bagan Pengeluaran Pemerintah Menurut Jenis dan Fungsi

Pengeluaran pemerintah menurut jenis :

1. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan

baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

2. Belanja bunga utang adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru.
3. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
4. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
5. Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
6. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun.

7. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
8. Belanja lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pengeluaran pemerintah menurut fungsi :

1. Fungsi pelayanan umum untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan mendukung pelaksanaan Pemilu
2. Fungsi Anggaran militer (atau pengeluaran militer), juga dikenal dengan anggaran pertahanan, adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata.
3. Fungsi ketertiban dan keamanan terdiri atas penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah, pengembangan peralatan Polri, peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lintas.
4. Fungsi Ekonomi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastuktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi

5. Fungsi lingkungan hidup merupakan belanja yang digunakan sebagai upaya terpadu untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan, dan penataan lingkungan hidup.
6. Fungsi perumahan dan fasilitas umum adalah untuk pembangunan yang menyangkut dengan fasilitas Publik, seperti pembangunan halte, penerangan lampu kota, pembangunan jembatan, Pembangunan taman kota, perbaikan maupun pembangunanjalan, serta pembangunan perumahan dan pemukiman.
7. Fungsi kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan.
8. Fungsi pariwisata dan kebudayaan adalah anggaran untuk pelaksanaan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif, meliputi pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya, serta ekonomi kreatif pariwisata.
9. Fungsi agama, merupakan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan nasional di bidang agama, seperti program dukungan manajemen dan kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama.
10. Fungsi pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian Negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran

pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

11. Fungsi perlindungan sosial untuk menjaga konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin terutama melalui penguatan program PKH, serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/POLRI.

2.1.3.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

1). Model Pembangunan *Rostow* dan *Musgrave*

Model ini menggambarkan hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi, diantaranya yaitu tahap awal perkembangan ekonomi, pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi terhitung besar, karena pemerintah harus menyediakan segala prasarana seperti prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur danlainnya. Pada tahap berikutnya peranan investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Adanya campur tangan swasta menimbulkan kegagalan pasar, sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak, tahap ini disebut sebagai tahap menengah pembangunan ekonomi. Tahap terakhir yaitu tahap ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran –pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan, menurut Musgrave, suatu proses pembangunan diketahui

dengan adanya persentase investasi swasta terhadap GNP semakin besar dari pada persentase investasi pemerintah (Mangkoesobroto,1994).

2). Hukum Wagner

Menurut teori Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Musgrave menyatakan bahwa kondisi demikian disebut sebagai “*law of growing public expenditures*”. Dimana peningkatan pengeluaran pemerintah terletak pada penggunaan sumber daya ekonomi dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah. Hukum Wagner menyatakan bahwa semakin banyaknya kegiatan – kegiatan yang dilakukan pemerintah maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Hukum Wagner memberikan asumsi bahwa ada hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan pengeluaran pemerintah. Selain itu, didasarkan pada pengamatan empiris dari negara – negara maju, namun berpotensi menimbulkan kegagalan pasar dan eksternalitas karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang – barang publik. Pandangan ini didasarkan pada teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang berdifat independen, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Mangkoesobroto, 1994).

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

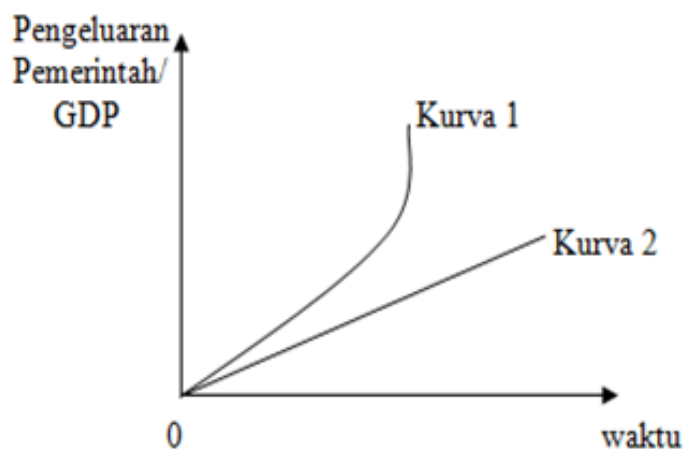
Keterangan :

PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,..n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam Gambar di bawah ini, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1, dan bukan seperti ditunjukkan oleh kurva 2.



Gambar 8. Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

2.1.4 Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami banyak negara terutama negara berkembang, maka dalam rencana pembangunan ekonomi masyarakat bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan jika dibandingkan

dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerja, pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku.

Penyebab Pengangguran

Pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang menjalar di beberapa negara. Dalam mengurangi jumlah angka pengangguran harus ada kerja sama lembaga pendidikan masyarakat, dan lain-lain. Menurut Selly Ollyviana bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran sebagai berikut :

1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja.
Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar dari pada kesempatan kerja yang tersedia.
2. Struktur lapangan kerja yang tidak seimbang .
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang, apabila kesempatan jumlahnya sama atau lebih besar dari pada angkatan kerja maka pengangguran belum tentu tidak terjadi.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan pemanfaatan angkatan kerja antardaerah tidak seimbang.

Menurut Sukirno (2000), pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut :

- a. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan.
- b. Pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*), yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan

padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetap tidak mengurangi jumlah produksi.

c. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu.

Untuk melihat tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan pada periode tahun tertentu, dapat diketahui melalui indikator pengangguran terbuka. Menurut BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengetahui besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

2.1.4.1 Teori Pengangguran

1) Teori Keynes

Untuk menanggapi masalah pengangguran, Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik. Menurut Teori Keynes, masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini dapat dilimpahkan pada mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan mengakibatkan kerugian, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, sehingga produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara yang menyediakan

lapangan kerja adalah sektor wisata, dengan tujuan untuk mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat dapat terjaga. Sehingga tidak menambah resesi serta diharapkan mampu untuk mengatasi pengangguran akibat resesi (Soesastro, dkk, 2015).

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris bertujuan untuk membandingkan atau memperkuat penelitian yang dilakukan dengan merujuk ke beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul	Variabel/Metode	Hasil
1	Raja Rita Nurrahmah (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2010- 2013)	Pendapatan asli daerah (PAD) (X1), belanja pegawai (X2), belanja barang (X3), belanja modal (X4) dan jumlah penduduk (X5) Pertumbuhan ekonomi (Y) Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.	Hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah, belanja barang belanja modal dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2	Rudi Alamsyah dan M. Ilhamsya h Siregar (2019)	Infrastruktur Publik Dan Percepatan Pembangunan Di Indonesia	Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah dan populasi sebagai variabel kontrol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja infrastruktur memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan dari hasil penelitian juga ditemukan adanya kointegrasi jangka panjang antara belanja infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi.

			metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model <i>Autoregressive Distributed Lag (ARDL)</i> .	
3.	I Gede Komang Angga Dianaputra (2016)	Pengaruh Pembiayaan Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015	Anggaran pendidikan (X1) anggaran kesehatan (X2) Indeks Kualitas Manusia (Y1) Pertumbuhan ekonomi (Y2) metode analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau <i>path analysis</i>	hasil analisis ditemukan bahwa pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks kualitas manusia. Pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap indeks kualitas manusia. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks kualitas manusia memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia. Pengaruh tidak langsung tersebut ditunjukkan dengan variabel indeks kualitas manusia merupakan sebagai variabel intervening.
4	Merlin Anggraeni (2017)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015	Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (X1), Variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan (X2), Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian (X3), Variabel Pertumbuhan ekonomi (Y) Teknik analisis data menggunakan analisis data <i>time series</i> dengan model ECM (<i>Error Correction Model</i>).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap PDB sebesar 1,19% dalam jangka panjang dan sebesar 1,58 % dalam jangka pendek. (2) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap PDB sebesar 0,37 % dalam jangka panjang dan sebesar 0,32% dalam jangka pendek. (3) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB sebesar 0,06 % dalam jangka panjang

				dan sebesar 0,09% dalam jangka pendek. (4) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian secara simultan berpengaruh baik terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Variabel ECT sebesar - 0.784920 menunjukkan penyesuaian terhadap kondisi ekuilibrium selama 1 tahun 7 bulan.
5	Martin Luter, Irlan Indrocahyo, Islahwani Loka Vita Resti	Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Belanja infrastruktur (X1) Pertumbuhan ekonomi (Y) Metode penelitian ini menerapkan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh belanja infrastruktur terhadap perekonomian NTT pertumbuhan.	Temuan studi menunjukkan bahwa belanja infrastruktur jalan dan konstruksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Jadi, itu akan terjadi menjadi lebih baik jika belanja infrastruktur pemerintah dapat diprioritaskan untuk jalan dan gedung proyek konstruksi. Selain itu, belanja untuk infrastruktur lain seperti jembatan, air jaringan, instalasi listrik dan telepon diatur lebih baik, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTT.
6	Pardamean Hutabarat (2013)	Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	belanja pegawai (X1), belanja barang (X2), belanja modal (X3), dan jumlah penduduk (X4), Pertumbuhan ekonomi daerah (Y) Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi data panel dengan model efek random yang menggunakan alat bantu pengolahan data dengan program aplikasi Eviews 5.1	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan dan parsial belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan tingkat keyakinan 95% secara parsial belanja pegawai, belanja barang dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

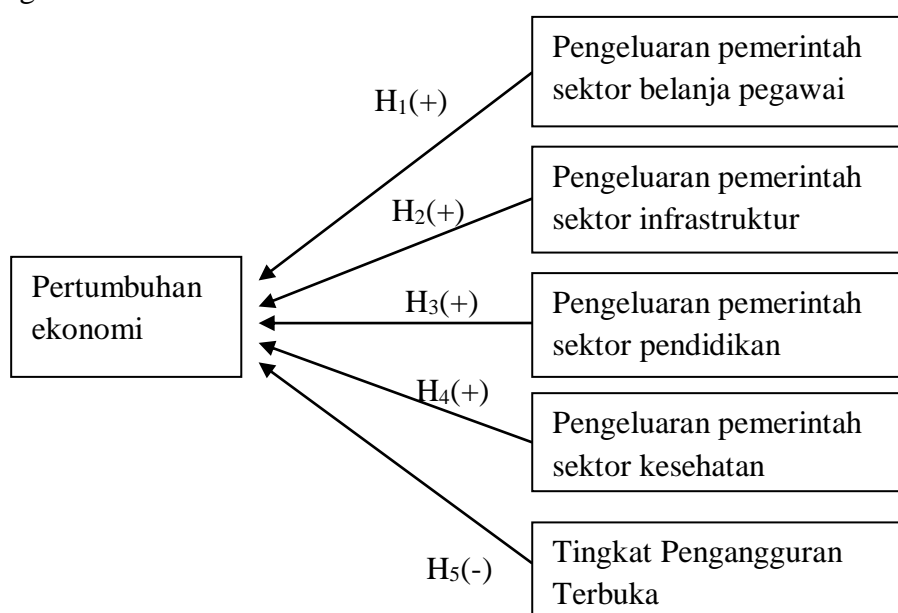
				dengan tingkat keyakinan 90%.
7	Muhammad Nurcholish (2014)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014	Pertumbuhan Ekonomi (X1), Upah Minimum (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X3) Terhadap Tingkat Pengangguran (Y) Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kuantitatif. Teknik analisa data yang sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian adalah menggunakan model analisis regresi data panel serta menggunakan klasifikasi intensitas dan GIS.	Berdasarkan hasil regresi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif. Sedangkan untuk pengujian F hitung, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
8.	M Amirul Mu'minin dan Wahyu Hidayat R (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	Pertumbuhan ekonomi (X1), Jumlah Penduduk (X2), Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi data panel	Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dimana jika pertumbuhan ekonomi naik 1% maka Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar - 0.282, 2) Jumlah Penduduk berpengaruh secara Positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. hal ini menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan Jumlah Penduduk sebesar 1% maka Tingkat Pengangguran Terbuka juga akan naik sebesar 0.001. Koefisien Determinan (R ²) sebesar 0.967435 atau 96,7453%. hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (X1), Jumlah Penduduk (X2), dalam menjelaskan variabel terikat yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) sebesar 0.967435 atau 96,7453%, sedangkan sisanya 3,2565% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

9	Nurul Septiani (2019)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010-2017)	pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1), sektor kesehatan (X2), sektor Infrastruktur (X3) dan pertumbuhan ekonomi (Y) menggunakan regresi linear berganda	Berdasarkan uji regresi linear berganda secara parsial diperoleh pada variabel pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi dengan nilai Sig. $0,422 > 0,05$ dan $0,123 > 0,05$. Variabel pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi dengan nilai Sig. $0,005 < 0,05$. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Sig. $0,003 < 0,05$. Pandangan islam melihat bahawasannya pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengejar kesejahteraan materil didunia saja, melainkan kesejahteraan diakhirat. Yang terpenting dari pertumbuhan ekonomi terletak pada pertumbuhan, pemerataan dan keadilan, sehingga tercipta kesejahteraan. Pendidikan dan kesehatan kabupaten Pringsewu masih jauh dari kata adil, dimana masih banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin, serta masih banyaknya Masyarakat pringsewu yang belum menerima bantuan kesehatan dari pemerintah.
10	Jani Paradiska (2020)	Pengaruh Komposisi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi-Provinsi Se-Sumatera)	pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur(X1), kesehatan(X2), pendidikan(X3 dan ketenagakerjaan(X4) pertumbuhan ekonomi (Y) Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara komposisi pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera, sedangkan komposisi pengeluaran pemerintah di sektor

metode Analisis Data Panel dengan model FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)	pendidikan dan ketenagakerjaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.
---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, maka dalam penelitian ini kerangka pemikirannya sebagai berikut :



2.4 Hipotesis

- 2.4.1 Diduga pengeluaran pemerintah sektor belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
- 2.4.2 Diduga pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
- 2.4.3 Diduga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

- 2.4.4 Diduga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
- 2.4.5 Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
- 2.4.6 Diduga pengeluaran pemerintah sektor belanja pegawai, sektor infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yaitu kabupaten Lampung Barat, kabupaten Lampung Selatan, kabupaten Lampung Tengah, kabupaten Lampung Timur, kabupaten Lampung Utara, kabupaten Mesuji, kabupaten Pesawaran, kabupaten Pesisir Barat, kabupaten Pringsewu, kabupaten Tanggamus, kabupaten Tulang Bawang, kabupaten Tulang Bawang Barat, kabupaten Way Kanan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung dengan periode penelitian yaitu 8 tahun dari tahun 2012-2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif karena penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sugiyono (2014:131)

Data yang digunakan bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dan Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung yang meliputi data realisasi belanja pegawai, belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan

persentase Tingkat Pengangguran Terbuka. Cakupan wilayah yang menjadi penelitian yaitu 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung tahun 2012-2019. Data pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan PDRB di 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung tahun 2012-2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistika. Pemilihan periode penelitian pada tahun 2012-2019 karena pada tahun 2012 kabupaten Pesisir Barat baru dibentuk hasil pemekaran dari kabupaten Lampung Barat.

3.3 Oprasional Variabel Penelitian

Variabel digolongkan dalam dua jenis yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen mencakup 5 variabel yakni belanja pegawai (X_1), belanja infrastruktur (X_2), belanja pendidikan (X_3) belanja kesehatan (X_4), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X_5), sedangkan variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi (Y).Guna lebih memudahkan mengenali variabel yang akan dioperasionalkan, pengukuran variabel disajikan dalam Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Nama Variabel	Pengukuran	Sumber	Simbol	Satuan
1	PE	$\frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}}$	BPS	Y	%
2	BP	$\frac{\text{realisasi belanja pegawai}}{\text{TotalBelanjaDaerah}}$	BPS	X_1	%
3	Inf	$\frac{\text{realisasi belanja infrastruktur}}{\text{TotalBelanjaDaerah}}$	DJPK	X_2	%
4	Pnd	$\frac{\text{realisasi belanja pendidikan}}{\text{TotalBelanjaDaerah}}$	DJPK	X_3	%
5	Kes	$\frac{\text{realisasi belanja kesehatan}}{\text{TotalBelanjaDaerah}}$	DJPK	X_4	%
6.	TPT	$\frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}}$	BPS	X_5	%

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Untuk mengukur variabel pertumbuhan ekonomi diproksikan melalui nilai pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2012-2019. Penulis menggunakan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh perubahan harga atau inflasi telah dihilangkan sehingga lebih menggambarkan perekonomian secara riil. PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004) :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1)}{\text{PDRB } t-1} \times 100 \%$$

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah tanpa memperhatikan kepemilikan asal faktor produksi atas barang dan jasa tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB suatu wilayah dapat dilakukan melalui pendekatan produksi dimana metode ini juga biasa dikatakan sebagai pendekatan nilai tambah. Hal ini dikarenakan PDRB berperan sebagai nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai (BP) dalam penelitian ini diproksikan dengan realisasibelanja pegawai dibagi dengan total belanja daerah, dinyatakan dalam persen.

$$BP = \frac{\text{realisasi belanja pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.3.2.2 Infrastruktur.

Infrastruktur (Inf) merupakan investasi pada sektor publik dimana pengeluaran digunakan untuk penambahan aset daerah yang memiliki nilai guna lebih dari setahun. Dalam penelitian ini diproksikan dengan realisasi belanja infrastruktur dibagi dengan total belanja daerah, dinyatakan dalam persen.

$$\text{Inf} = \frac{\text{realisasi belanja infrastruktur}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.3.2.3 Pendidikan.

Variabel Pendidikan (Pnd) dalam penelitian ini diproksikan dengan realisasi belanja pendidikan dibagi dengan total belanja daerah, dinyatakan dalam persen.

$$\text{Pnd} = \frac{\text{realisasi belanja pendidikan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.3.2.4 Kesehatan

Variabel Kesehatan (Kes) dalam penelitian ini diproksikan dengan realisasi belanja kesehatan dibagi dengan total belanja daerah, dinyatakan dalam persen.

$$\text{Kes} = \frac{\text{realisasi belanja kesehatan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja, dalam persen.

$$\text{TPT} = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Model Dinamis

3.4.1.1 Pengertian Model Dinamis

Pada model regresi (ekonometrika) yang menggunakan variabel data berkala, selain variabel waktu ke- t (sekarang), kita juga akan sering menjumpai variabel waktu ke- $(t-1)$ atau disebut variabel *lag*. Jika dalam suatu model muncul variabel respon Y_t yang selain menjadi fungsi dari variabel penjelas ke- t , juga menjadi fungsi variabel penjelas waktu sebelumnya (variabel penjelas *lag-1*, *lag-2* dan seterusnya) maka variabel tersebut dinamakan model dinamis lag. Sedangkan jika dalam model terdapat *lag* variabel respon sebagai variabel penjelas, model tersebut dinamakan model otoregresif. Model dinamis *lag* dan model otoregresif disebut model dinamis.

Ada 2 macam model regresi linear yang memperhatikan pengaruh waktu yaitu :

1. Model Dinamis Distribusi *Lag*

Suatu variabel tak bebas apabila dipengaruhi oleh variabel bebas pada waktu t , serta dipengaruhi juga oleh variabel bebas pada waktu $t - 1$, $t - 2$ dan seterusnya disebut model dinamis distribusi *lag*. Model dinamis distribusi *lag* ada 2 jenis yaitu :

a. Model *Infinite Lag*

$$\text{Model : } Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \varepsilon_t \quad (3.1)$$

Model (3.1) disebut model *infinite lag* sebab panjang beda kalanya tidak diketahui.

b. Model *Finite Lag*

$$\text{Model : } Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \beta_k X_{t-k} + \varepsilon_t \quad (3.2)$$

Model (3.2) disebut model *finite lag* sebab panjang beda kalanya diketahui yaitu sebesar k.

2. Model Dinamis *Autoregressive*

Apabila variabel tak bebas dipengaruhi oleh variabel bebas pada waktu t, serta dipengaruhi juga oleh variabel tak bebas itu sendiri pada waktu t – 1 maka model tersebut disebut *autoregressive* dengan : $Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \varepsilon_t$

Ada tiga alasan pokok mengapa beda kala (*time lag*) dapat terjadi

1. Alasan psikologis

Adanya unsur kebiasaan (*habit*) kita biasanya tidak merubah pola konsumsi dengan segera setelah setelah harga barang yang bersangkutan turun atau terjadi kenaikan pendapatan sebab proses perubahan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan (menimnulkan rasa malu, segan, dan lainnya). Selain itu, hal ini juga bergantung pada apakah kenaikan pendapatan tersebut bersifat tetap atau hanya sementara. Jika hanya sementara, mungkin kenaikan pendapatan tersebut hanya untuk disimpan.

2. Alasan teknologi

Jika harga modal relatif turun dibandingkan dengan tenaga kerja manusia, maka ada kemungkinan untuk mengganti tenaga kerja dengan mesin-mesin yaitu perubahan dari padat karyamenjadi padat modal. Tent saja tambahan modal akan memerlukan waktu. Lagi pula jika penurunan harga hanya terjadi sementara, pemimpin perusahaan mungkin tidak secara tergesa-gesa mengganti

tenaga buruh dengan mesin, khususnya jika ada harapan bahwa setelah penurunan harga akan segera terjadi kenaikan yang justru akan lebih tinggi dari sebelumnya. Kadang pengetahuan yang kurang sempurna tentang situasi akan menyebabkan teradinya “lag”.

3. Alasan institusi atau kelembagaan

Sebagai contoh, keharusan kontrak mungkin mencegah perusahaan untuk beralih dari sumber tenaga kerja yang satu ke sumber tenaga kerja yang lain. Seseorang yang menyetor uangnya selama 24 bulan tidak mungkin memindahkan uangnya seandainya tingkat bunga di bank mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada bunga deposito, kecuali jika dia bersedia membayar denda.

3.4.1.2 Simulasi dengan Menggunakan *Time Lag*

Penggunaan *time lag* untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat pada periode waktu tertentu. Prosedur simulasi dengan *time lag* akan berhenti ketika koefisien regresi dari variabel *lag* mulai menjadi tidak signifikan secara statistik atau koefisien dari setidaknya salah satu variabel berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya. Namun, panjang maksimum (*lag optimum*) harus ditentukan terlebih dahulu, dapat menggunakan kriteria *Akaike* atau *Schwarz* untuk memilih *lag length* yang sesuai (Gujarati and Porter, 2009). Dengan demikian, dalam penelitian ini menggunakan simulasi *time lag* untuk mengetahui periode waktu yang diperlukan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun penelitian 2012 – 2019.

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan estimasi regresi menggunakan data panel untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dengan bantuan aplikasi eviews 9. Data panel atau *pooled* data merupakan data yang terdiri atas data seksi silang (beberapa variabel) dan data runtut waktu (berdasar waktu) (Winarno, 2011: 91).

Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat (Nachrowi dan Usman, 2002). Model data panel merupakan persamaan model dengan menggunakan data silang tempat (*cross section*) dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + e_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*. Sedangkan persamaan model dengan data silang waktu (*time series*) yaitu :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots(3.2)$$

Dimana T adalah banyaknya data *time series*.

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *cross section* dan *time series*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(3.3)$$

$$I = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Regresi menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*Omitted-variabel*). (Widiarjono, 2018 : 363-364)

Ada 3 teknik pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis data panel, yaitu :

3.4.2.1 Model *Pooled Least Square (Common Effect)*

Model *Pooled Least Square* dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *cross section* dan *time series*. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini sering kali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya

bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

3.4.2.2 Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*Fixed Effect*) atau *Least Square Dummy Variable* atau disebut juga *Covariance Model*. Pada metode *Fixed Effect*, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weighted*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section* (Gujarati, 2005). Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data. Pemilihan model antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan menggunakan *Fixed Effect Model*.

3.4.2.3 Model Efek Acak (*Random Effect*)

Pendekatan model data panel ketiga yaitu model efek acak (*random effect*). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error*. Karena hal inilah, model efek acak juga disebut model komponen *error* (*error component model*). Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal

ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan penggunaan efek tetap ataupun acak ditentukan dengan menggunakan uji *Hausman* dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *fixed effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *fixed effect* dengan *random effect*.

3.5 Teknik Pengolahan Data

3.5.1 Pemilihan Model Regresi

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dalam menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor belanja pegawai, belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Beberapa hal yang akan dihadapi saat menggunakan data panel adalah koefisien slope dan intersepsi yang berbeda pada setiap antar ruang dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, asumsi intersepsi, slope, dan error-nya perlu dipahami karena ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, beberapa kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleks estimasi parameternya sehingga diperlukan beberapa metode untuk melakukan estimasi parameternya, seperti pendekatan common effect, fixed effect, dan random effects (Widarjono,2013). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk pemilihan model regresi data panel yang paling tepat, diantaranya :

3.5.1.1 Uji Chow.

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik digunakan daripada model *common effect* :

H_0 : tidak ada beda (Common Effect)

H_a : ada beda (Fixed Effect)

Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *common effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect*.

Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *common effect*.

Jika, model yang terpilih adalah model *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman untuk mengetahui apakah lebih baik memakai *fixed effect model* atau *random effect model*.

3.5.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik digunakan daripada model *random effect*.

Hipotesis dalam Uji Hausmann sebagai berikut:

H_0 : OLS tidak efisien (Random Effect)

H_a : OLS efisien (Fixed Effect)

Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *random effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect*.

Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*.

3.5.1.3 Uji BG-LM Test

Uji BG-LM Test digunakan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik digunakan daripada model *common effect*.

H_0 : tidak ada beda (*Common Effect*)

H_a : ada beda (*Random Effect*)

Jika, nilai probabilitas Breusch Pagan lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima, jadi model yang tepat adalah *common effect* dibandingkan dengan model *random effect*.

Jika, nilai probabilitas Breusch Pagan lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak, jadi model yang tepat adalah *random effect* dibandingkan dengan model *effect effect*.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik sebagai salah satu prasyarat analisis pada regresi untuk menilai hasil regresi yang ada merupakan hasil estimasi yang terbaik dan layak untuk dianalisis.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Agus Widarjono (2018 : 49) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual hasil regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian untuk mengetahui normalitas data melalui Uji Jarque-Bera, yang didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat *asymptotic*. Jika, residual terdistribusi normal maka nilai statistik JB akan sama dengan nol.

H_0 = Residu tersebar secara normal

H_a = Residu tersebar tidak normal.

Jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari JB tidak signifikan maka kita gagal menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik JB mendekati nol. (Widarjono, 2018 : 48).

Jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB kecil atau signifikan maka kita menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik JB tidak sama dengan nol. (Widarjono, 2018 : 48).

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Agus Widarjono (2018 : 113) uji heteroskedastisitas terkait dengan variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan atau heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu model regresi mengandung unsur heteroskedastisitas atau tidak (Widarjono, 2018 : 115) yaitu menggunakan metode white :

Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka ada masalah heteroskedastisitas.

Ada tidaknya heteroskedastisitas bisa diketahui melalui nilai probabilitas Chi Squares apakah lebih besar atau lebih kecil dari α .

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Agus Widarjono (2018 : 137) uji autokorelasi berarti terdapat korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. *Error term*

pada suatu periode waktu secara sistematis tergantung pada *error term* pada periode waktu yang lain, yang mengandung siklus bisnis. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu model regresi mengandung unsur autokorelasi atau tidak, menggunakan metode Breusch-Godfrey :

Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka tidak ada masalah autokorelasi.

Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka ada masalah autokorelasi.

Ada tidaknya autokorelasi bisa diketahui melalui nilai probabilitas Chi Squares (χ^2) apakah lebih besar atau lebih kecil dari α .

3.5.2.4 Deteksi Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan hubungan antara variabel independen dalam satu regresi. (Widarjono, 2013: 101). Deteksi Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model persamaan memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Metode yang digunakan dalam deteksi multikolinieritas adalah matriks koefisien korelasi antar variabel. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi semakin membesar maka diduga ada multikolinieritas. Dengan hipotesis jika nilai koefisien korelasi $> 0,90$ maka dikatakan ada multikolinieritas yang tinggi. Sedangkan jika nilai VIF $< 0,90$ maka dikatakan ada multikolinieritas yang rendah. (Ghozali, 2013).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan menggunakan program Eviews 9. Analisis Regresi linier berganda digunakan untuk menyatakan berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Model dalam penelitian ini adalah:

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 BP_{it} + \beta_2 Inf_{it} + \beta_3 Pnd_{it} + \beta_4 Kes_{it} + \beta_5 TPT_{it} + u_{it}$$

Dimana :

PE = Pertumbuhan Ekonomi (%)

α = konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = koefisien variabel independen

BP = Belanja Pegawai (%)

Inf = Infrastruktur (%)

Pnd = Pendidikan (%)

Kes = Kesehatan (%)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

u_{it} = error term

3.5.3.1 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji hipotesis (Uji statistik t), uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} alternatif yang menyatakan suatu variabel independen secara individu maka hipotesis

mempengaruhi variabel dependen dapat diterima, artinya ada berpengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika t_{hitung} lebih rendah dari t_{tabel} maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada berpengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi α sebesar 0,05.

Dalam penelitian ini, uji-t adalah sebagai berikut:

3.5.3.1.1 Belanja Pegawai

$H_0: \beta_1 \leq 0$, belanja pegawai (BP) yang diprosikan dengan realisasi belanja pegawai memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

$H_a: \beta_1 > 0$, belanja pegawai (BP) yang diprosikan dengan realisasi belanja pegawai memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

3.5.3.1.2 Infrastruktur

$H_0: \beta_2 \leq 0$, infrastruktur (Inf) yang diprosikan dengan realisasi belanja infrastruktur memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

$H_a: \beta_2 > 0$, infrastruktur (Inf) yang diprosikan dengan realisasi belanja infrastruktur memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

3.5.3.1.3 Pendidikan

$H_0: \beta_3 \leq 0$, pendidikan (Pnd) yang diproksikan dengan realisasi belanja pendidikan memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

$H_a: \beta_3 > 0$, pendidikan (Pnd) yang diproksikan dengan realisasi belanja pendidikan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

3.5.3.1.4 Kesehatan

$H_0: \beta_4 \leq 0$, kesehatan (Kes) yang diproksikan dengan realisasi belanja kesehatan memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

$H_a: \beta_4 > 0$, kesehatan (Kes) yang diproksikan dengan realisasi belanja kesehatan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

3.5.3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

$H_0: \beta_5 \leq 0$, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diproksikan dengan presentase TPT memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

$H_a: \beta_5 > 0$, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diproksikan dengan presentase TPT memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

3.5.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji statistik F)

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempunyai berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis secara bersama-sama (simultan) dengan menggunakan uji statistik F dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan dengan derajat kebebasan ($df_1 = (k-1)$) dan ($df_2 = (n-k-1)$). Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah:

$H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4; \beta_5 = 0$, seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4; \beta_5 \neq 0$, setidaknya 1 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$.

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$.

3.5.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) atau *goodness of fitness* bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dapat menerangkan dengan baik variasi variabel terikat atau untuk mengukur kebaikan suatu model. Koefisien Determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2010). Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar

koefisien determinasi menunjukkan bahwa semakin besar pula variasi variabel bebas dalam membentuk variabel terikat. Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi terikat dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel bebas yang dimasukkan dalam model.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai (BP) pada dua tahun sebelumnya, Belanja infrastruktur (Inf) pada dua tahun sebelumnya, belanja pendidikan (Pnd) pada dua tahun sebelumnya, dan belanja kesehatan (Kes) pada dua tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung tahun 2012-2019.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada dua tahun sebelumnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung tahun 2012-2019.
3. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai *koefisien determinasi* (R^2) sebesar 0,84 yang artinya bahwa variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi belanja pegawai (BP), infrastruktur (Inf), pendidikan (Pnd), kesehatan (Kes) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 84% dan sisanya 16% dipengaruhi oleh variabel variabel lain.
4. Nilai intersep tertinggi adalah kabupaten Mesuji sebesar 4,16, artinya pertumbuhan ekonomi di kabupaten Mesuji tanpa adanya pengaruh belanja pegawai, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,16%. Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 3,99%, dan

Kabupaten Pesisir Barat sebesar 3,96%. Sementara itu, nilai intersep akhir terendah terdapat pada Kabupaten Pringsewu sebesar 3,12%.

5.2 Saran

1. Pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Lampung perlu melakukan kebijakan dalam meningkatkan anggaran belanja pegawai seperti memberikan insentif-insentif kepada pegawai/aparatur yang memiliki kinerja terbaik dan memberikan konsekuensi kepada pegawai/aparatur yang tidak maksimal dalam menjalankan tugas, sehingga akan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun pembangunan infrastruktur belum merata, disarankan kepada pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Lampung untuk mengalokasikan belanja infrastruktur untuk ekonomi kreatif daerah-daerah tersebut sehingga muncul pusat-pusat kegiatan ekonomi baru.
3. Pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran belanja pendidikan dan melakukan pembangunan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang berkualitas lebih merata sampai ke daerah terpencil.
4. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah harus meningkatkan anggaran belanja kesehatan dengan perbanyak pembangunan puskesmas-puskesmas, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, menyediakan mobil ambulance minimal satu di setiap puskesmas dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sampai ke daerah pelosok.

5. Dalam mengurangi pengangguran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat memfokuskan pada penyerapan tenaga kerja dengan memberikan dana dan pelatihan untuk daerah yang memiliki pariwisata yang menarik wisatawan sehingga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
6. Kekurangan dari hasil penelitian ini adalah variabel belanja pendidikan tidak sesuai dengan hipotesis, yaitu memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan tahun penelitian atau mengubah variabel bebas yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga hasil penelitian akan berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Rudi dan M.Ilhamsyah Siregar. 2019. *Infrastruktur Publik Dan Percepatan Pembangunan Di Indonesia*. Jurnal. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala : Banda Aceh.
- Anggraeni, Merlin .2017. *Analisis Berpengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia Periode 1970-2015*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi .Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Astari, Mayra, Lies Marina Hamzah Dan Arivina Ratih. 2019. *Hukum OKUN: Pertumbuhan ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia*. Jurnal. Fakultas Ekonomi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Lampung : Universitas Lampung.
- Bastias, Desi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Bhakti, Nadia Ayu dan Istiqomah Suprpto. 2014. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 0393 Akreditasi NO.80/DIKTI/Kep/2012.
- Boediono. 2018. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE.
- Bose, N., Hag. pue, M.E. and Osborn, D.R. 2007. Public Expenditure and Economic Growth; A Disaggregated Analysis for Developing Countries. The Manchester School, 75-85, 533-556. Boston: McGrawHill Inc.
- BPS LAMPUNG PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2011- 2019. <https://lampung.bps.go.id/dynamic/2016/10/10/25/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-menurut-pengeluaran-2011---2019.html>. Diakses 13 Agustus 2020 (10.33 WIB)
- BPS LAMPUNG. Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2019. <https://Lampung.bpsr.go.id/publication/2019/08/16/801f3b93e755a417d7e80da5/Provinsi-Lampung-dalam-angka-2019.html> . Diakses 24 Desember 2020 (20.33 WIB)
- BPS. Statistik Keuangan Kabupaten/Kota Pulau Sumatera dan Jawa Tahun 2012-2019.

- Case, Karl E. Dan Ray C. Fair. 2007. *Prinsip Prinsip Ekonomi*. Edisi Delapan Jilid Dua. Erlangga. Jakarta.
- Darmawan, Arya. 2020. *Pengaruh Kemiskinan, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Dan Bisnis. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- David, Ray. Lili Yan Ing. 2016. *Addressing Indonesia's Infrastructure Deficit : Bulletin of Indonesia Economic Studies*. Vol. 52, issue 1. <http://www.tandfonline.com/doi/abs>
- Dianaputra, I Gede Komang Angga. 2017. *Berpengaruh Pembiayaan Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015*. Skripsi. Bali :Universitas Udayana.
- Djayasinga, Marselina.2015. *Membedah APBD*. Graha Ilmu.Yogyakarta.
- DJPb. Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 Provinsi Lampung. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://djp.bkemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/2019/08_kfr2019_Lampung.pdf&ved=2ahUKEwjvieX5lu7tAhXU63MBHdz8ALQQFjAlegQICBAB&usq=AOvVaw3ikGu5ivdAK4ZR4jW205-c. Diakses 24 Desember 2020 (20.30 WIB)
- Fitri, Nurul dan Sasqia Putri. 2019. *Berpengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah di Kawasan Barat Indonesia*. Jurnal. Jurusan Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga.
- Gujarati, Damodar N., & Porter, Dawn C. 2009. *Basic Econometric 5th Edition*. McGraw – Hill : New York.
- Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi.2012. *Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah*.Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasyim, A. brahim. 2016. *Ekonomi Makro Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hutabarat, Pardamean. 2013. *Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Tesis. Program Studi Ilmu

Akuntansi Pada Sekolah Pascasarjana. Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara

- Lal, I, D Sulaiman, MA Jalil and A Hussain. 2010. 'Test of Okun's Law in some Asian countries: co-integration approach'. European journal of scientific research, 40(1): 73–80.
- Luter, Martin, Irlan Indrocahyo dan Islahwani Loka Vita Resti. 2019. *Berpengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal. Program Studi Statistika Ekonomi, Politeknik Statistika STIS : Jakarta Timur.
- Mahyuddin. 2006. *Analisis Pasar Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan*. Institut Pertanian Bogor
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mangkoesoebroto, G. (1994). *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta
- Marselina. 2018. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Matthew, O., & Udom, E. 2015. Estimating the impact of the components of public expenditure on economic growth in Nigeria (a bound testing approach), *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(3), 1-8.
- Muminin, M Amirul Dan Wahyu Hidayat R. 2017. *Pengaruh Pertumbuhan ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015*. Jurnal. Jawa Timur : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta : Raja Grafindo Prasada.
- Nurcholis, muhammad. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014*. Jurnal. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No.1 Juni 2014.
- Nurhaliza dan Nurus Soimah. 2020. *Pengaruh Belanja Pemerintah Dibiidang Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2017* . Jurnal. Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Kaltara. Kalimantan : Volume 1 Nomor 1 Juni 2020.
- Nurrahmah, Raja Rita. 2016. *Berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah (Pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2013)*. Skripsi. Jurusan Akutansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji : Kepulauan Riau

- Padang, Lidyawati Dan Murtala. 2019. *Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Indonesia*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Aceh Universitas Malikussaleh.
- Paradiska, Jani. 2020. *Berpengaruh Komposisi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus: Provinsi-Provinsi Sumatera)*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan/Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Lampung . Bandar Lampung.
- Putri, Nurul Septiani Eka, dan Arief Pujiyono. 2017. *Berpengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. PhD diss., Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Purwanto, Nurtanio Agus. 2006. *Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara*. Jurnal. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rekanaharto, M. 2014. *Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2003-2012*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Manajemen. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Sanjaya, Putu Bagus Krisna Adi, dan I Made Jember. 2019. *Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud, 8(9), 2072–2101.
- Septiani, Nurul. 2019. *Analisis Berpengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010-2017)*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Septiatin, Aziz, Mawardi, Dan M.Ade Khairur Rizki. 2016. *Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Indonesia*. Jurnal. I-Economic Vol. 2. No.1.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soesastro, Hadi. 2015. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Tjodi, Andi Maujung, Try Oldy Rotinsulu dan George M.V Kawung. 2018. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor kesehatan*

Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Manado : Universitas Sam Ratulangi.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2002. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga.* Ahli Bahasa Drs. Haris Munandar M.A. Edisi Kedelapan. Jakarta : PT. Erlangga

Tohar. 2000. *Membuka Usaha Kecil.* Yogyakarta: Kanisius

Yunianto, Dwi . 2021. *Analisis Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.* Jurnal. Kalimantan Timur : Forum Ekonomi.

Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya .* Jakarta : Ekonosia.

Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews.* Edisi kelima. Yogyakarta :UPP STIMYKPN

Wijono, Wiloejo wirjo. 2005. *Mengungkap sumber sumber pertumbuhan ekonomi indonesia dalam lima tahun terakhir.* Jurnal. Jakarta : Volume V NO.2

Winarno, Wing Wahyu. 2011. *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews.* Edisi Ketiga. Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP STIMYKPN)